MATERI REGULASI · KHUSUS BPRS

Fatwa Tanggung Renteng Ultra Mikro

Fatwa | Nomor 162/DSN-MUI/VII/2025 | Tahun 2025

> Tanggung Renteng Berdasarkan Prinsip Syariah dalam Pembiayaan Ultra Mikro

✓ Berlaku

Status diperiksa 17 November 2026



GAMBARAN UMUM

Aturan ini tentang apa?

> **Fatwa DSN-MUI tentang tanggung renteng berdasarkan prinsip syariah dalam pembiayaan ultra mikro; rincian ketentuan belum terverifikasi.**

KENAPA ATURAN INI ADA

Fatwa DSN-MUI No. 162/DSN-MUI/VII/2025 tentang Tanggung Renteng Berdasarkan Prinsip Syariah dalam Pembiayaan Ultra Mikro tercatat di katalog Pustaka Regulasi untuk BPRS. Halaman resmi dsnmui.or.id hanya memuat judul, dan naskah lengkapnya belum berhasil dibuka dari sumber resmi, sehingga isi pokok belum ditulis.

Untuk: Khusus BPRS

Topik: akad/produk syariah

ISI POKOK

Poin pokok

1 DSN-MUI menerbitkan fatwa berjudul Tanggung Renteng Berdasarkan Prinsip Syariah dalam Pembiayaan Ultra Mikro (No. 162/DSN-MUI/VII/2025). Isi ketentuannya belum diverifikasi; lihat Perlu cek.

Sumber: dsnmui.or.id

YANG HARUS DILAKUKAN

Kewajiban BPR/BPRS

- Minta DPS menelaah naskah lengkap fatwa ini sebelum produk atau kebijakan terkait tanggung renteng pada pembiayaan ultra mikro dijalankan.
- Simpan salinan resmi naskah fatwa di arsip kepatuhan syariah BPRS.

PER JABATAN

Artinya di meja kerja

Dewan Pengawas Syariah

Dapatkan naskah resmi fatwa ini dan beri opini syariah sebelum dipakai di produk BPRS.

Kepatuhan (Satuan/Pejabat Eksekutif Kepatuhan)

Pastikan kebijakan dan SOP terkait tanggung renteng pada pembiayaan ultra mikro sudah mengacu ke fatwa ini.

PENUTUP

Status & sumber resmi

✓ Berlaku

Fatwa DSN-MUI No. 162/DSN-MUI/VII/2025; berstatus terbit menurut katalog.

Diperiksa 17 November 2026

⚠ PERLU DICEK

- Naskah lengkap fatwa tidak bisa dibuka - halaman dsnmui.or.id hanya berisi judul, PDF tidak tersedia di dsnmui.or.id maupun arsip mui.or.id (Wayback).
- Poin pokok, istilah, dan tanya jawab belum diisi; perlu naskah resmi (mis. dari DPS/Sekretariat DSN-MUI atau buku himpunan fatwa DSN-MUI).
- Nomor fatwa diambil dari katalog; belum dicocokkan dengan naskah.

SUMBER RESMI YANG DIBACA

dsnmui.or.id
https://dsnmui.or.id/tanggung-renteng-berdasarkan-prinsip-syariah-dalam-pembiayaan-ultra-mikro/

Disclaimer. Materi Ruang Bankir disusun untuk edukasi dan bukan nasihat hukum. Acuan yang berlaku tetap naskah resmi peraturan perundang-undangan, ketentuan OJK/LPS/BI, fatwa DSN-MUI, serta kebijakan dan SOP internal bank Anda. Ruang Bankir tidak berafiliasi dengan OJK, LPS, Bank Indonesia, PPATK, Perbarindo, atau Asbisindo. Nama lembaga disebut hanya sebagai rujukan sumber. Disusun dengan bantuan AI (riset); selalu cocokkan dengan naskah resmi.